



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
7. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Karo adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
13. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
14. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
15. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
16. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
17. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

18. Biasa...

18. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
19. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.
20. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
22. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
25. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
26. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang Lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, mencakup:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Bagian...

Bagian Kedua
Asas Klasifikasi
Pasal 3

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

BAB III
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. arsip yang tercipta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Pemerintah Kabupaten Karo hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Kabupaten Karo yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB IV
ARSIP DINAMIS
Pasal 5

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh pengguna secara internal dan eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bupati, sebagai pimpinan tingkat tertinggi di Kabupaten, dapat mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tingkat tinggi di Kabupaten, dapat mengakses arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;

c.Asisten...

- c. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati, sebagai pimpinan tingkat tinggi dapat mengakses seluruh arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat eselon III (Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala Bagian), sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian), Fungsional Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
 - f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum; dan
 - c. publik dapat mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Sarana klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Arsip dinamis Pemerintah Daerah terbagi menjadi tiga (3) kategori yang meliputi:

- a. biasa/terbuka;
- b. terbatas; dan
- c. rahasia.

Pasal 9

Arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pertanian;
- b. arsip dinamis yang meliputi Urusan Perdagangan;
- c. arsip dinamis yang meliputi Urusan Perhubungan;
- d. arsip dinamis yang meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan;
- e. arsip dinamis yang meliputi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. arsip dinamis yang meliputi Urusan Lingkungan Hidup;
- g. arsip dinamis yang meliputi Urusan Perindustrian;
- h. arsip dinamis yang meliputi Urusan Penanggulangan Bencana;
- i. arsip dinamis yang meliputi Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- j. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
- l. arsip dinamis yang meliputi Urusan Sosial;
- m. arsip dinamis yang meliputi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- n. arsip dinamis yang meliputi Urusan Kesehatan;
- o. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pemerintahan Daerah;
- p. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pemuda dan Olahraga;
- r. arsip dinamis yang meliputi Urusan arsip dinamis yang meliputi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- s. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
dan

t. arsip...

- t. arsip dinamis yang meliputi Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan dan Non Kepegawaian yaitu, Perencanaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Kearsipan, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Hubungan Masyarakat, Penelitian Pengkajian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Kepustakaan, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Persandian, dan Pengawasan.

Pasal 10

Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan dan layanan pengadaan barang/jasa seperti dokumen pengadaan/jasa Pemerintah Daerah;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal serta Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 11

Arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah keorganisasian, administrasi Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari Perangkat Daerah (PD) seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. Arsip dinamis yang tercipta dari Inspektorat seperti tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karo.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di Records Center (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

Pasal 14

- (1) Pengamanan Informasi Arsip Dinamis Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 15

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR..38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

I. UMUM

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	001.1	Garuda				
	001.2	Bendera Kebangsaan				
	001.3	Lagu Kebangsaan				
	001.4	Daerah				
		1. Provinsi				
		2. Kabupaten/ Kota				
	002	Tanda kehormatan /penghargaan untuk pegawai lihat 861.1	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	002.1	Bintang				
	002.2	Satyalencana				
	002.3	Samkarya Nugraha				
	002.4	Monumen				
	002.5	Penghargaan secara adat				
	002.6	Penghargaan lainnya				
	003	Hari Raya/ Besar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	003.1	Hari Besar Nasional, Hari Pahlawan dan sebagainya				
	003.2	Hari Raya Keagamaan				
	003.3	Hari Ulang Tahun				
	003.4	Hari Besar Internasional				
	004	Ucapan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	004.1 004.2 004.3 004.4	Ucapan Terima kasih Ucapan Selamat Ucapan Bela sungkawa Ucapan lainnya			yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	006 006.1 006.2 006.3	Tanda Jabatan Pamong Praja Tanda Pengenal Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	007	Himbauan/ Seruan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
		Gedung Kantor termasuk instalasi Prasarana Fisik Pamong	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	011	Kantor/ Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	012 012.1 012.2 012.3	Rumah Dinas Tanah Untuk rumah dinas Perabot Rumah Dinas Rumah Dinas Golongan 1	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	012.4 012.5	Rumah Dinas Golongan 2 Rumah Dinas Golongan 3				

1	2	3	4	5	6	7
	013	Mess/ Guest House / Asrama	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	016	Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	019	Protokol	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	019.1	Upacara Bendera				
	019.2	Tata Tempat				
		1. Pemasangan Gambar Presiden/Wapres				
	019.3	Audiensi/ menghadap pimpinan				
	019.4	Alamat- alamat kantor Pejabat				

1	2	3	4	5	6	7
	019.5	Bandir/ umbul-umbul/ Spanduk				
3	020	PERALATAN				
	020.1	Penawaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	023	Perabot Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris, Ketata usahaan barang (Kartu Inventaris Barang/ Kartu Inventaris Ruangan)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
		Meliputi: Barang bergerak dan barang tidak bergerak				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, KEARSIPAN DAN SANDI				
	041 041.1	Perpustakaan Deposit (Seperti: Karya Cetak, Karya Rekam, Bibliografi, Katalog Induk Daerah, Pengolahan Bahan Pustaka, Daftar Tambah Buku dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	041.2	Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka				

1	2	3	4	5	6	7
	041.3 041.4	(Seperti: Layanan Informasi, Promosi dan Permasyarakatan Perpustakaan, Perawatan, Bahan Pustaka, Bahan Perindustrian, Stock Opname, Bimbingan Pustaka, Pustaka Keliling, dll) Pembinaan Perpustakaan Penyiapan Bahan Perpustakaan				
	042	Dokumentasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	045 045.1 045.2 045.3 045.4 045.5 045.6	Kearsipan Pola Klasifikasi Penataan Berkas Penyusutan Arsip 1. JRA 2. Pemindahan Arsip 3. Penilaian Arsip 4. Pemusnahan Arsip 5. Penyerahan Arsip 6. Berita Acara Penyusutan Arsip 7. Daftar Pencarian Arsip Pembinaan Kerasipan 1. Bimbingan Teknis Pemeliharaan/ Perawatan Arsip Pengawetan / Fumigasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	046	Sandi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
	047	Website	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	048	Pengelolaan data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
	049	Jaringan Komunikasi data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN				
	050.1	Repelita/ 8 Sukses 1. Pelita Daerah 2. Bantuan Pembangunan Daerah 3. Bappeda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	051	Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan disini: Proyek Prasarana fisik pemerintahan, Contoh: Proyek Kependaraan 051.86	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik (Tambahkan Rincian 200 pada 052)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan/ Ketertiban (Tambahkan Rincian 300 pada 053) Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tambahkan Rincian 400 pada 054) Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian (Tambahkan Rincian 500 pada 055)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		Contoh: Proyek Pasar 055.112			Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	056	Bidang Pekerjaan Umum /Ketenagaan (Tambahkan Rincian 600 pada 056) Contoh: Proyek Jembatan 056.3	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan (Tambahkan Rincian 700 pada 057)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian (Tambahkan Rincian 800 pada 058)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan (Tambahkan Rincian 900 pada 059)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN				
	060.1	Program Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	061	Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Badan Semi Pemerintah, BKS-AKSI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ Tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	067	Pelayananan Umum/Pelayanan publik/Analisis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/Siskomdagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	069	Standar Pelayanan Minimal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	072	Survei	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	075	Kementerian Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	076	Non Kementerian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI (RAPAT/SEMINAR)				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	083	Komponen, eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	-	-	-	-
	097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	-	-	-	-
	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	-	-	-	-
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN (Seperti: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri, dll)				
	101	Negeri	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	102	GDN	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	110	PEMERINTAH PUSAT				
	111	Presiden Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan	-	-	-	-
	111.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR				
	111.2	Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato				
	112	Wakil Presiden Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan	-	-	-	-
	112.1	Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR				

1	2	3	4	5	6	7
	112.2	Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato				
	113	Kabinet	-	-	-	-
	114	Departemen Dalam Negeri	-	-	-	-
	115	Departemen Lainnya	-	-	-	-
	116	Lembaga Pemerintahan Non Departemen	-	-	-	-
	117	Lembaga Pemerintah	-	-	-	-
3	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	12.04	Penyusunan Laporan Daerah	-	-	-	-
	120.1	2. Monografi Koordinasi				
	120.2	Instansi Tingkat Provinsi 1. Dinas Otonomi 2. Instansi Vertikal 3. Kerjasama Antar Provinsi/ Daerah				
	121	Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentikan, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
	122	Wakil Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentikan, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
	123	Sekretariat Wilayah tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentikan, Serah Terima jabatan dan	-	-	-	-
	124	Pembentukan / Pemekaran Wilayah Pembinaan /Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	124.1	Geografis, Gedung, Sungai, Pulau, dan Sebagainya	-	-	-	-
	124.2	Pemekaran Wilayah				
	124.3	Forum Koordinasi lainnya				
	125	Pembentukan Pemekaran Wilayah Pembinaan /Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda	-	-	-	-
	125.1	Geografis, Gunung, Sungai dan sebagainya				
	125.2	Pembentukan Wilayah				
	125.3	Pemindahan Ibukota				
	125.4	Perubahan Batas Wilayah				
	125.5	Pemekaran Wilayah				
	126	Pembagian Wilayah	-	-	-	-
	127	Penyerahan Urusan	-	-	-	-
	128	Swapraja/ Penataan Wilayah/ daerah	-	-	-	-
4	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
	131	Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan (Seperti: Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dll)	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	132	Badan-Badan Pertimbangan Daerah	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	133	Pembentukan/Pemekaran Wilayah (Seperti: Pemberian/Perubahan nama Daerah, Benda, Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, dsb)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	134	Pembagian Wilayah	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	135	Penyerahan Urusan/ Pelimpahan Kewenangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	136 136.1 136.2 136.3 136.4 136.5	Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sambutan/Pengarahannya / Amanat Pembentukan Kecamatan Pemekaran Kecamatan Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	140.1	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal Pembentukan Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	141	Pengakatan, Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	143	Kekayaan Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
	146 146.1 146.2 146.3 146.4 146.5	Kewilayahan Pembentukan Desa/Kelurahan Pemekaran Desa Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan Perubahan Nama Desa/Kelurahan Kerjasama antar Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	148 148.1 148.2 148.3	Perangkat Kelurahan Kepala Kelurahan Sekretaris Kelurahan Staf Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	149 149.1 149,2 149,3	Dewan Kelurahan Rukun Tetangga Rukun Warga Rukun Kampung	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
6	150	LEGISLATIF MPR/DPR				
	151	Keanggotan MPR	-	-	-	-
	151.1	Pencalonan				
	151.2	Pemberhentian				
	151.3	Recall				
	151.4	Pelanggaran				
	152	Persidangan	-	-	-	-
	153	Kesejahteraan	-	-	-	-
	153.1	Keuangan				
	153.2	Penghargaan				
	154	Hak	-	-	-	-
	155	Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan	-	-	-	-
	156	Persidangan	-	-	-	-
	157	Kesejahteraan	-	-	-	-
	157.1	Keuangan				
	157.2	Penghargaan				
	158	Jawaban Pemerintah	-	-	-	-
	159	Hak	-	-	-	-
7	160	DPRD PROVINSI				
	161	Keanggotaan (Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, Pemberhentian, Pelanggaran)	-	-	-	-
	162	Persidangan/ Rapat (Paripurna/ Pleno, Komisi/ Fraksi, Rapat lainnya, Reses dll)	-	-	-	-
	163	Kesejahteraan (Seperti: Keuangan, Penghargaan, dll)	-	-	-	-
	164	Hak	-	-	-	-
	165	Sekretaris DPRD Provinsi	-	-	-	-
	166	Badan Kelengkapan Dewan	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		(Seperti: Badan kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya)				
8	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan (meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pelanggaran)	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan/ Rapat (Meliputi: Paripurna/ Pleno, Komisi/Fraksi, Rapat lainnya, Reses)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan (Meliputi: Keuangan, Penghargaan)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	176	Badan Kelengkapan Dewan Termasuk Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	180	HUKUM				

1	2	3	4	5	6	7
	180.1	Konstitusi (Meliputi: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	181	Peradilan (Meliputi: Peradilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama, Konstitusi, Militer, HAM, Internasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	182	Hukum Adat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	185	Imigrasi (Meliputi: Visa, Passport, Exit, Reentry, Lintas Batas)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	186	Lembaga Pemasyarakatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan (Meliputi: TAP MPR, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	189	Keputusan (Meliputi: Menteri, Lembaga Non Departemen, Lembaga Lainnya)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	189.1	Instruksi				

1	2	3	4	5	6	7
		(Meliputi: Presiden, Menteri, Lembaga Non Departemen, Gubernur, Bupati/ Walikota)				
10	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
		(Meliputi: Perwakilan Asing, Kerjasama Luar Negeri, dll)				
	193 193.1	Kerjasama dengan Negara Asing Bilateral dan Multilateral	-	-	-	-
	194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	-	-	-	-
	195	Laporan Luar Negeri	-	-	-	-

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

III. POLITIK

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
1	200	POLITIK				
	201	Kebijakan Umum Meliputi : Kebijakan Umum di Bidang Politik baik Tingkat Pusat maupun Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	202	Orde Baru	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	203	Reformasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	210	KEPARTAIAN				
	211	Lambang Partai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	212	Kartu Tanda Anggota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	213	Bantuan Keuangan Parpol	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221 221.1 221.2 221.3	Perjuangan Perintis kemerdekaan Angkatan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	222 222.1 222.2	Kekaryaan Pepabri Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	223	Keagamaan (Muhammadiyah, NU, Persatuan Tarikat Islam, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	224	Kedaerahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	225	Lembaga Swadaya Masyarakat (Seperti: P.K.D.P, Y.L.K.I, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	226	Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Seperti: Yayasan Jantung, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	Organisasi Kesehatan (Seperti: IDI, IBI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	232	Organisasi Guru (Seperti : Persatuan Guru Republik Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	233	Organisasi Sarjana (Seperti : Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	234	Organisasi Kepengacaraan (Seperti : Persatuan Advokat Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	235	Organisasi Fungsional (Seperti: Asosiasi Arsiparis, Pustakawan, Notaris, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	236	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	237	Organisasi Wartawan Indonesia (Seperti: Persatuan Wartawan Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	238	Ikatan Cendekiawan Indonesia (Seperti: ICMI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	239	Organisasi Profesional dan Fungsional lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	240	ORGANISASI KEPEMUDAAN				
	241	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	242	Organisasi Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	243	Organisasi Pelajar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	244	Organisasi Pemuda Keagamaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	245	Organisasi Pemuda Kepartaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	246	Organisasi Kepemudaan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	250	ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN				
	251	Organisasi Pekerja (Seperti: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	252	Organisasi Buruh Internasional (Seperti: ILO, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	253	Organisasi Tani Indonesia (Seperti: HKTI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	254	Organisasi Nelayan (Seperti: HNSI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	260	ORGANISASI PEREMPUAN				
	261	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	262	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	263	Pemberdayaan Perempuan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	264	Konggres Wanita	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	272	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	273	Kampanye	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	275	Pemilih / Daftar Pemilih	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	276 276.1 276,2 276.3 276,4 276.5	S a r a n a T P S Kendaraan Surat suara Kotak Suara Dana	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	277	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	278	Penetapan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan dan Calon Pemilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	280	PENGUCAPAN SUMPAH JANJI MPR, DPR, Pengucapan Sumpah Janji MPR, DPR, DPD	-	-	-	-
10	290					

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	Keamanan Perbatasan Provinsi Kab/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	302	Ketertiban	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	312	Laut	-	-	-	-
	313	Udara	-	-	-	-
	314	Perbatasan	-	-	-	-
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	322	Wajib Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	323	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	324	Kekaryaan TNI/Pejabat Sipil dan TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331 331.1 331.2 331.3 331.4	Kepolisian Polisi Pamong Praja Kamra Kamling Jaga Wana	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	Bidang Teknis
	332	Huru hara/ Demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	333	Senjata Api Tajam	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	336	Surat- surat Kaleng	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	338	Himbauan / Larangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	339	Teroris	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				

1	2	3	4	5	6	7
	351	Makar / Pemberontakan (Meliputi : Kerusuhan, Anarkis)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, Pencurian/ Perampasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	354	Subversi/Penyelundupan/ Narkoba	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan (Seperti : Uang, Ijazah, Dokumen Negara, Kejahatan Pemalsuan Lainnya)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	356	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	359	Kajahatan dan Pelanggaran Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	363	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	364 364.1	Kebakaran Pemadam Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
8	370	KECELAKAAN				
	371	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	372	L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	373	U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	374	Sungai / Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	380	KETERTIBAN				
	381	Kampanye (Meliputi: Himbauan, Pemasangan Spanduk, Ketertiban)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	382	Pembinaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	383	Penyelidikan dan Penindakan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	384	Pelanggaran Meliputi: Razia, Sanksi-sanksi, Penyelesaian Perkara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	390					

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	402	PNPM Mandiri Pedesaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN				
	411	Pembinaan Usaha Gotong Royong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	411.1	Swadaya Gotong Royong 1. Penataan Gotong Royong 2. Gotong Royong Dinamis 3. Gotong Royong Statis 4. Pungutan				
	411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD) 1. Pembinaan 2. Klasifikasi 3. Proyek				
	411.3	4. Musyawarah Latihan Kerja Masyarakat				

1	2	3	4	5	6	7
	411.4	1. Kader Masyarakat 2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3. Pusat latihan 4. Kursus-kursus 5. Kurikulum/silabus 6. Keterampilan 7. Pramuka Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
	411.5	1. Program 2. Pembinaan Organisasi 3. Kegiatan Penyuluhan				
	411.6	1. Publikasi 2. Peragaan 3. Sosio Drama 4. Siaran Pedesaan 5. Penyuluhan Lapangan Kelembagaan Desa 1. Kelompok Tani 2. Rukun Tani 3. Subak 4. Dharma Tirta				
	412	Perekonomian Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	412.1	Produksi Desa 1. Pengolahan				
	412.2	Keuangan Desa 1. Perkreditan Desa 2. Inventarisasi Desa 3. Perkembangan/ pelaksanaan 4. Bantuan/Stimulans				

1	2	3	4	5	6	7
	412.3	5. Petunjuk/pembinaan pelaksanaan Koperasi Desa				
	412.4	1. Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 2. Koperasi Usaha Desa				
	412.5	Penataan Bantuan Pembangunan Desa 1. Jumlah desa yang diberi bantuan 2. Pengarahan 3. Pusat				
	412.6	4. Daerah Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa				
	413	Prasarana Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	413.1	Prasarana Desa 1. Pembinaan				
	413.2	2. Bimbingan teknis Pemukiman Kembali Penduduk 1. Lokasi 2. Diskusi				
	413.3	3. Pelaksanaan Masyarakat Pradesa 1. Pembinaan				
	413.4	2. Penyuluhan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1. Rumah sehat 2. Proyek perintis 3. Pelaksanaan				
	413.5	4. Pengembangan 5. Perbaikan kampung Lingkungan Hidup				

1	2	3	4	5	6	7
	414 414.1 414.2 414.3 414.4	Pengembangan Desa Tingkat Perkembangan Desa 1. Jumlah Desa 2. Pemekaran Desa 3. Pembentukan Desa Baru 4. Evaluasi 5. Bagan Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) 1. Penyuluhan program 2. Lokasi UDKP 3. Pelaksanaan 4. Bimbingan/pembinaan 5. Evaluasi Tata Desa 1. Inventarisasi 2. Penyusunan pola tata desa 3. Aplikasi tata desa 4. Pemetaan 5. Pedoman pelaksanaan 6. Evaluasi Perlombaan Desa 1. Pedoman 2. Penilaian 3. Kejuaraan 4. Piagam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	415	Koordinasi Internal dan Eksternal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	420	PENDIDIKAN				

1	2	3	4	5	6	7
	421 421.1 421.2 421.3 421.4 421.5 421.6 421.7 421.8 421.9	Sekolah Pra Sekolah Sekolah Dasar Sekolah Menengah Sekolah Tinggi Sekolah Kejuruan Kegiatan Sekolah Kegiatan Pelajar 1. Reuni Darmawisata 2. Pelajar teladan 3. Resimen Mahasiswa Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Luar Sekolah /Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	422 422.1 422.2 422.3 422.4 422.5	Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran Mapras, Perpeloncoan Tahun Pelajaran Hari Libur Uang Sekolah, Klasifikasikan disini SPP Beasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	423 423.1 423.2 423.3 423.4 423.5 423.6	Metode Belajar Kuliah Ceramah, simposium Diskusi Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur Kurikulum Karya Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	423.7	Ujian				

1	2	3	4	5	6	7
	424	Tenaga Pengajar (Seperti : Guru, Dosen, Instruktur, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	425 425.1 425.2 425.3	Sarana Pendidikan Gedung 1. Gedung sekolah 2. Kampus 3. Pusat kegiatan mahasiswa Buku Perlengkapan Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	426 426.1 426.2 426.3 426.4	Keolahragaan Cabang Olah Raga Sarana 1. Gedung olah raga 2. Stadion 3. Lapangan 4. Kolam renang Pesta Olah Raga : PON, Porsade, Olimpiade, dsb KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	427	Kepemudaan/ Kegiatan Remaja (Seperti: Karang Taruna, Pertukaran Pemuda, Remaja Masjid, dll.	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	428	Kepramukaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	429	Sanggar Kegiatan Belajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
	431	Kesenian (Meliputi: Sarana dan Kegiatan Kesenian)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	432	Kepurbakalaan (Seperti : Museum, Peninggalan Bersejarah, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	433	Sejarah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	434	Bahasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	435	Usaha Pertunjukan, Hiburan Kesenangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	436	Kepercayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	437	Legenda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	438	Adat Istiadat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441 441.1 441.2 441.3 441.4 441.5 441.6 441.7 441.8	Pembinaan Kesehatan Gizi Mata Jiwa Kanker Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Perawatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM). Pekan Imunisasi Nasional (PIN)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	442 422.1 422.2	Obat-Obatan Pengadaan Penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	443 443.1 443.2	Penyakit Menular Pencegahan Pemberantasan, Pencegahan Penyakit Menular Langsung 1. Kusta 2. Kelamin 3. Frambusia 4. TBC/AIDS/HIV	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	443.3	Epidemiologi 1. Kolera 2. Imunisasi 3. Survey Lense 4. Rabies/Anjing gila				
	443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung 1. Malaria 2. Demam Berdarah HDF 3. Filaria 4. Serangga				
	443.5	Higiene/Sanitasi Lingkungan 1. Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman 2. Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3. Pestisida				
	444 444.1 444.2 444.3 444.4 444.5	Gizi Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar Keracunan Makanan Menu Makanan Rakyat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Program Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	445	Puskesmas Keliling, Ploklitik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	446	Tenaga Medis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	447	Alat Medis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	448	Pengobatan Tradisional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	448.1	Pijat				
	448.2	Tusuk Jarum				
	448.3	Jamu Tradisional				
	448.4	Dukun/Paranormal				
6	450	AGAMA				
	451	Islam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	451.1	Peribadatan				
		1. Sholat				
		2. Zakat Fitrah				
		3. Puasa				
		4. MTQ Rumah				
	451.2	Ibadah Tokoh				
	451.3	Agama				
	451.4	Pendidikan				
		1. Tinggi				
		2. Menengah				
		3. Dasar				
		4. Pondok Pesantren				
		5. Gedung Sekolah				
		6. Tenaga Pengajar				
		7. Buku				
		8. Dakwah				

1	2	3	4	5	6	7
		9. Organisasi/Lembaga Pendidikan				
	452 452.1 452.2 452.3 452.4 452.5	Protestan Peribadatan Rumah Ibadah Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine Mazhab Organisasi gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	453 453.1 453.2 453.3 453.4 453.5	Katolik Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan, Pendeta, Pastor Mazhab Organisasi gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	454 454.1 454.2 454.3 454.4 454.5	Hindu Peribadatan Rumah Ibadah Tokoh agama, Rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	455 455.1 455.2 455.3 455.4 455.5	Budha Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	456 456.1 456.2	Urusan Haji ONH Manasik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	457	Agama Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		(Meliputi: Peribadatan, Rumah Ibadah, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan)			yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
7	460	SOSIAL				
	461	Rehabilitasi Penderita Cacat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	461.1	Cacat Mata				
	461.2	Cacat tubuh				
	461.3	Cacat mental				
	461.4	Bisu /tuli				
	462	Tuna Susila	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	462.1	Gelandangan				
	462.2	Pengemis				
	462.3	Tuna susila				
	462.4	Anak Nakal				
	463	Kesejahteraan Anak/ Keluarga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	463.1	Anak Putus Sekolah				
	463.2	Ibu teladan				
	463.3	Anak asuh				
	464	Pembinaan Pahlawan Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	464.1	Tunjangan kepada pahlawan dan jandanya Perintis kemerdekaan Meliputi : Pembinaan dan Penghargaan				
	464.2	Tunjangan kepada Perintis				
	464.3	Cacat Veteran				
	465	Kesejahteraan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	465.1 465.2	Lanjut Usia Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi			yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	466 466.1 466.2 466.3 466.4	Sumbangan Sosial Korban Bencana Pencarian Dana untuk Sumbangan Meliputi: Penyelenggaraan undian, Ketangkasan, Bazar Panti Asuhan Panti Jompo	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	467 467.1	Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi: Bimbingan, Pendidikan Kesehatan, Pemukiman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	468	Palang Merah Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	469 469.1 469.2 469.3 469.4	Makam Umum Pahlawan Khusus keluarga raja Krematorium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471 471.1	Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk 1. Biodata 2. Nomor Induk Kependudukan 3. Kartu Tanda Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		4. Kartu Keluarga 5. Advokasi Identitas Penduduk				

1	2	3	4	5	6	7
	471.2	<p>Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpindahan penduduk WNI 2. Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia 3. Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4. Daerah Terbelakang 5. Bedol desa 				
	471.3	<p>Perpindahan Penduduk Antar Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk Indonesia ke luar negeri 2. Orang asing tinggal sementara 3. Orang asing tinggal tetap 4. Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional) 				
	471.4	<p>Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat bencana alam 2. Akibat kerusakan sosial 3. Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4. Pendaftaran penduduk rentan 				
	472 472.1	<p>Pencatatan Sipil Kelahiran, Kematian, dan Advokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelahiran 2. Kematian 3. Advokasi kelahiran dan kematian 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	472.2	<p>Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan agama Islam 2. Perkawinan agama non Islam 				

1	2	3	4	5	6	7
	472.3 472.4	3. Perceraian agama Islam 4. Perceraian agama non Islam 5. Advokasi perkawinan dan perceraian Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi 1. Pengangkatan anak 2. Pengakuan anak 3. Pengesahan anak 4. Perubahan anak 5. Pembatalan anak 6. Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan Akta Pencatatan Kewarganegaraan 1. Akibat perkawinan 2. Akibat kelahiran 3. Non perkawinan 4. Non kelahiran 5. Perubahan WNI ke WNA				
	473 473.1 473.2	Informasi Kependudukan Teknologi Informasi 1. Perangkat keras 2. Perangkat lunak 3. Jaringan komunikasi data Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi 1. Daerah maju 2. Daerah berkembang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	473.3	3. Daerah terbelakang Pengolahan Data Kependudukan 1. Pendaftaran penduduk 2. Kejadian vital penduduk				

1	2	3	4	5	6	7
	473.4	3. Penduduk non registrasi Pelayanan Informasi Kependudukan 1. Media elektronik 2. Media cetak 3. Outlet				
	474 474.1	Perkembangan Penduduk Pengarahan Kuantitas Penduduk 1. Struktur jumlah 2. Komposisi 3. Fertilitas 4. Kesehatan reproduksi 5. Morbiditas penduduk 6. Mortalitas penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk 1. Anak dan remaja 2. Penduduk usia produktif 3. Penduduk lanjut usia				
	474.3	4. Gender Penataan Persebaran Penduduk 1. Migrasi antar wilayah 2. Migrasi Internasional 3. Urbanisasi 4. Sementara				
	474.4	5. Migrasi non permanen Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk				
		1. Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2. Pelayanan kelembagaan ekonomi 3. Pelayanan kelambagaan sosial budaya 4. Partisipasi masyarakat				

1	2	3	4	5	6	7
	474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan 1. Pendidikan jalur sekolah 2. Pendidikan jalur luar sekolah 3. Pendidikan jalur masyarakat 4. Pembangunan berwawasan kependudukan				
	475 475.1 475.2 475.3 475.4	Proyeksi dan Penyerasian kebijakan kependudukan Indikator Kependudukan Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 1. Kependudukan 2. Pemanfaatan indikator kependudukan 3. Sosialisasi indikator kependudukan Proyeksi Kependudukan 1. Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2. Pemanfaatan proyeksi kependudukan Analisis Dampak Kependudukan 1. Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2. Pemanfaatan analisis dampak kependudukan Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	475.5	1. Lembaga Internasional 2. Lembaga masyarakat dan nirlaba 3. Lembaga usaha swasta Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah 1. Lembaga pemerintah 2. Pemerintah provinsi dan kota				

1	2	3	4	5	6	7
	475.6	3. Pemerintah Kabupaten Analisis				
	476	Monitoring	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	477	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	478	Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	HUMAS				
	481 481.1 481.2 481.3 481.4	Penerbitan Surat kabar Majalah Buku Penerjemahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	482 482.1	Radio RRI 1. Siaran Pedesaan jagan di klasifikasikan disini	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		2. Non RRI 3. Luar negeri				
	483	Televisi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	484	Film	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	485 485.1 485.2 485.3	Pers Kewartawanan Wawancara Informasi Nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	486	Grafika	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	487 487.1	Penerangan Pameran non komersil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	488	Operation Room	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	489	Hubungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
10	490	PENGADUAN MASYARAKAT				
		Pengaduan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

VI. PEREKONOMIAN

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN				
	500.1	Dewan Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	501	Pengadaan Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	502	Pengadaan Sandang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	503.1	SITU HO, SITU NON HO				
	503.2	Daftar Ulang (Meliputi : SITU HO, SITU NON HO)				
	503.3	Pemeriksaan Tahunan				

1	2	3	4	5	6	7
	504	Standar Pengawasan Mutu (Seperti: ISO, SII, SNI, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	505	Hak Kekayaan Intelektual (Seperti : Hak Paten, Hak Cipta, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
	510.1 510.2 510.3	Promosi Perdagangan 1. Pekan Raya 2. Iklan 3. Pameran non komersil Pelelangan Tera	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	511 511.1 511.2	Pemasaran Sembilan Bahan Pokok, tambahkan kode Wilayah: Beras,Garam, Tanah, Minyak goreng Pasar (Seperti: Plaza, Swalayan, Mini Market, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	512	Ekspor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	513	Impor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	514	Perdagangan Antar Pulau	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	515	Perdagangan Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	516	Pergudangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	517	Aneka Usaha Perdagangan Koperasi untuk BUUD, KUD (lihat 412.31-412.32)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
3	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman Pangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	521.1	Program				
		1. Bimas/Inmas termasuk kredit				
		2. Penyuluhan				
	521.2	Produksi				
		1. Padi/Panen				
		2. Palawija				
		3. Jagung				
		4. Ketela Pohon/Ubi-ubian				
		5. Hortikultura				

1	2	3	4	5	6	7
	521.3	6. Sayuran/Buah-buahan 7. Tanaman Hias 8. Pembudidayaan Rumput Laut Sarana Usaha Pertanian 1. Sarana Usaha Pertanian 2. Peralalatan meliputi : Traktor dll 3. Pembibitan				
	521,4	4. Pupuk Perlindungan Tanaman 1. Penyakit, penyakit daun, penyakit batang, Hama, Serangga, wereng, walang sangit, tungru, tikus dan sejenisnya 2. Pemberantasan hama meliputi: penyemprotan, penyiangan, Geropyokan, Sprarayer				
	521,5	3. Pemberantasan melalui Udara 4. Pestisida Tanah Pertanian Pangan 1. Persawahan 2. Perladangan 3. Kebun 4. Rumpun Ikan Laut 5. KTA/ Lahan Kritis				
	521.6	Pengusaha Petani				
	521.7	Bina Usaha 1. Pasca Panen 2. Pemasaran hasil				
	522	Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	522.1	Program 1. Hak Pengusahaan Hukum 2. Tata guna hutan				

1	2	3	4	5	6	7
	522.2 522.3 522.4 522.5 522.6 522.7	3. Perpetaan hutan 4. Tumpang sari Produksi 1. Kayu 2. Non kayu Sarana Usaha Kehutanan Penghijauan, Reboisasi Pelestarian 1. Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka marga satwa 2. Berburu meliputi: Larangan dan izin berburu 3. Kebun Binatang 4. Konservasi Lahan Penyakit/hama Jenis -Jenis Hutan 1. Hutan Hidup 2. Hutan Wisata 3. Hutan Produksi 4. Hutan Lindung				
	523 523,1 523.2 523.3	Perikanan Program 1. Penyuluhan 2. Teknologi Produksi 1. Pelelangan Usaha Perikanan 1. Pembibitan 2. Daerah Penangkapan 3. Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain 4. Jaring terapung	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		4. Jaring terapung				

1	2	3	4	5	6	7
	523.4	Sarana 1. Peralatan 2. Kapal 3. Pelabuhan				
	523.5	Pengusaha				
	523.6	Nelayan				
	524	Peternakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	524.1	Produksi 1. Susu ternak rakyat 2. Telur 3. Daging 4. Kulit				
	524.2	Sarana Usaha Ternak 1. Pembibitan 2. Kandang Ternak				
	524.3	Kesehatan Hewan 1. Penyakit hewan 2. Pos Kesehatan Hewan 3. Tesi pullorum 4. Karantina 5. Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahannya				
	524.4	Perunggasan				
	524.5	Pengembangan Ternak 1. Inseminasi Buatan 2. Pembibitan/Bibit Unggul 3. Penyebaran Ternak				
	524.6	Makanan Ternak				
	524.7	Tempat Pematangan Hewan				
	524.8	Data Peternakan				
	525	Perkebunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	525.1 525.2	Program Produksi 1. Karet 2. Teh 3. Tembakau 4. Tebu 5. Cengkeh 6. Kopra 7. Kopi 8. Coklat 9. Aneka Tanaman			yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	526 526.1 526.2 526.3 526.4	Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan Kelembagaan dan Keamanan (Meliputi: Desa Mandiri Pangan, Pokja, Sistem Kewaspadaan, Uji Labor) Pengendalian mutu dan pengawasan (Meliputi: Konsumsi Pangan, Diversifikasi Pangan, Pemberdayaan Pangan) Informasi data (Meliputi: Data Base, Pengembangan Cadangan Pangan, Analisa Pangan)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
4	530	PERINDUSTRIAN				
	530.08	Undang-undang Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	531	Industri Logam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	532	Industri Mesin/Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	533	Industri Kimia/Farmasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	534	Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan/Minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	536	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	537	Aneka Kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	538 538.1 538.2 538.3	Usaha Negara/BUMN Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Umum (Perum) Persero/ PT.CV	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	539	Perusahaan Daerah/BUMD/BLUD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	540	PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN				
	541 541.1	Minyak Bumi/ Bensin Pengusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	542 542.1 542.2	Gas Bumi Eksploitasi/Pengeboran 1. Kontrak Kerja Pengolahan meliputi: Tangki, Pompa, Tanker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	543 543.1 543.2 543.3 543.4 543.5	Aneka Tambang Timah Aluminium Boxit Besi termasuk besi tua Tembaga Batu Bara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	544	Logam mulia, emas, intan, perak	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	545	Logam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	546 546.1	Geologi Vulkanologi 1. Pengawasan Gunung Berapi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	546.2	Sumur Artesis, Air Bawah Tanah			Daerah/ Unit Kerja	
	547	Hidrologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	548	Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	549	Pesisir Pantai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
6	550	PERHUBUNGAN				
	551	Perhubungan Darat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	551.1	Lalu lintas Jalan Raya, Sungai, Danau 1. Keamanan Lalu lintas, rambu-rambu				
	551.2	Angkutan Jalan Raya 1. Perizinan 2. Terminal 3. Alat Angkutam				
	551.3	Angkutan Sungai 1. Perizinan				
	551.4	2. Terminal 3. Pelabuhan Angkutan Danau 1. Perizinan 2. Terminal 3. Pelabuhan				
	551.5	Feri				

1	2	3	4	5	6	7
	551.6	1. Perizinan 2. Terminal 3. Pelabuhan Perkereta Apian				
	552 552.1 552.2 552.3 552.4 552.5	Perhubungan Laut Lalu lintas Angkutan Laut, pelayanan umum 1. Keamanan lalu lintas, rambu-rambu 2. Pelayanan Dalam Negeri 3. Pelayanan luar Negeri Perkapalan alat angkutan Pelabuhan Pengerukan Penjagaan Pantai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	553 553.1 553.2 553.3	Perhubungan Udara Lalu lintas Udara/ Keamanan lalu lintas udara Pelabuhan Udara Alat angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	554	POS Meliputi Pos biasa, Pos Wesel, Kilat biasa, Kilat Khusus, dll	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	555 555.1 555.2 555.3 555.4 555.5	Telekomunikasi Telepon Telegram Telex/SSB, Faximile Satelit, Internet Stasiun Bumi, Parabola	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	556 556.1	Pariwisata dan Rekreasi Obyek Kepariwisata TMII	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	556.2 556.3 556.4	Perhotelan Travel Service Tempat Rekreasi			Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	557 557.1 557.2 557.3	Meteorologi Ramalan Cuaca Curah Hujan Kemarau Panjang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	560	TENAGA KERJA				
	560.1	Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	564 564.1 564.2	Tenaga Sukarela Butsi Padat Karya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	565	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	566	Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	569	Tenaga Orang Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	570	PERMODALAN				
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan (Join Venture/ Penyertaan Modal)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	576	Belanja Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	577	Modal daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
9	580	PEBANKAN DAN MONETER				
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	582	Tabungan/ Investasi (Seperti: Deposito, Tabanas, Takesra, Simpedes dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	583	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	584	Perasuransian / Asuransi dana kecelakaan lalu lintas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	585	Alat Pembayaran (Seperti: Cek, Giro, Wesel, Uang Transportasi, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	586	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara (Seperti: Obligasi)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
10	590	AGRARIA				
	591 591.1 591.2 591.3 591.4 591.5	Tata Guna Tanah Pemetaan dan Pengukuran Perpetaan Penyediaan Data Fatwa Tata Guna Tanah Tanah Kritis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	592 592.1 592.2	Landreform Redistribusi 1. Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan 2. Penentuan Tanah Lanreform 3. Pembagian Tanah Lanreform 4. Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform Ganti rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	592.3	1. Ganti rugi tanah kelebihan meliputi: Sengketa ganti rugi tanah, kelebihan tanah 2. Ganti rugi tanah absentee meliputi: sengketa ganti rugi tanah absentee 3. Ganti rugi tanah partikelir meliputi: sengketa ganti rugi tanah partikelir Bagi hasil				
	592.4	1. Penetapan imbangan bagi hasil 2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Gadai tanah				
	592.5	1. Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan 2. Pelaksanaan gadai tanah 3. Sengketa gadai tanah				
	592.6	Bimbingan dan penyuluhan Pengembangan				
	592.7	Yayasan dana landreform				
	593	Pengurusan Hak-hak Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	593.01	Penyusunan Program dan Bimbingan teknis				
	593.1	Sewa Tanah untuk tanaman tertentu: 1. Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus				
	593.2	Hak Milik 1. Perorangan 2. Badan Hukum				
	593.3	Hak Pakai 1. Perorangan 1) WNI 2) WNA 2. Badan Hukum 1) Badan Hukum Indonesia				

1	2	3	4	5	6	7
	593.4	2) Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat kantor dagang asing 3. Tanah gedung-gedung negara Guna Usaha 1. Perkebunan besar 2. Perkebunan rakyat 3. Peternakan 4. Perikanan 5. Kehutanan				
	593.5	Hak Guna Bagunan 1. Perorangan 2. Badan Hukum 3. P3MB (Panitia pelaksana penguasaan milik Belanda) 4. Badan hukum asing Belanda -Prrk No 5156 5. Pemulihan Hak (Pen Pres 4/ 1960)				
	593.6	Hak Pengelolaan 1. PN Perumnas, Bonded ware house, industrial estate, Real Estate 2. Perusahaan Daerah pembangunan				
	593.7	Sengketa Tanah 1. Peradilan Perkara Tanah				
	593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah 1. Pencabutan hak 2. Pembebasan Tanah 3. Ganti Rugi Tanah				
	594	Pendaftaran Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat	Bidang Teknis
	594.1	Pengukuran / Pemetaan 1. Fotogrametri 2. Teristris				

1	2	3	4	5	6	7
	594.2 594.3 594.4	3. Triangulasi 4. Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965) Sertifikat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)			Daerah/unit kerja	
	595 595.1 595.2 595.3 595.4	Lahan Transmigrasi Tata Guna Tanah Landreform Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	PEKERJAAN UMUM				
	601	Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	602.1	Tender				
	602.2	Penunjukan				
	602.3	Prakualifikasi				
		1. Daftar Rekanan Mampu (DRM)				
		2. Tanda Daftar Rekanan				
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	604.1	Tanah dan Batu seperti : Batu belah, Steen slaag, Spilit dsb				
	604.2	Aspal, Aspal buatan, Aspal alam (Butas)				
	604.3	Besi dan logam lainnya				
		1. Besi beton				
		2. Besi Profil				

1	2	3	4	5	6	7
		3. Paku 4. Aluminium, profil bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, Tech Til)				
	604.4	Pengawet kayu				
	604.5	Semen				
	604.6	Kayu				
	604.7	Bahan penutup atap (Genting, asbes gelombang, seng dan sebagainya)				
	604.8	Alat pengantung dan pengunci				
	604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya				
	605	Instalasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	605.1	Instalasi Bangunan				
	605.2	Instalasi Listrik				
	605.3	Instalasi Air Sanitasi				
	605.4	Instalasi Pengatur Udara				
	605.5	Instalasi Akustik				
	605.6	Instalasi Cahaya/Penerangan, dll				
	606	Konstruksi Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran				
	606.2	Konstruksi pencegahan terhadap gempa				
	606.3	Konstruksi pencegahan terhadap angin udara/ panas				
	606.4	Konstruksi pencegahan terhadap kekaduahan				
	606.5	Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive				
	606.6	Konstruksi pencegahan terhadap serangga				
	606.7	Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom				
2	610	PENGAIRAN				
	611	Irigasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	611.1	Bangunan Waduk 1. Bendungan 2. Tanggul 3. Pelimpahan Banjir 4. Menara Pegambilan			yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	611.2	Bangunan pengambilan 1. Bendungan 2. Bendungan dengan pintu bilas 3. Bendungan dengan pompa 4. Pengambilan bebas 5. Pengambilan bebas dengan pompa 6. Sumur dengan pompa 7. Kantung lumpur 8. Slit Ekstrator 9. Escape Channel				
	611.3	Bangunan Pembawa 1. Saluran 1) Saluran Induk 2) Saluran sekuler 3) Suplesi 4) Tersier 5) Saluran Kwarter 6) Saluran Pasangan 7) Saluran Tertutup/ Terowongan 2. Bangunan 1) Bagunan Bagi 2) Bangunan Bagi dan Sadap 3) Bangunan Sadap 4) Bangunan Check 5) Bangunan Terjun				
		3. Box tersier 4. Got Miring				

1	2	3	4	5	6	7
	<p>611.4</p> <p>611.5</p>	<p>5. Talang 6. Syphon 7. Gorong - gorong 8. Pelimpah samping</p> <p>Bangunan Pembuang</p> <p>1. Saluran 1) Saluran pembuang induk 2) Saluran pembuang sekunder 3) Saluran tersier</p> <p>2. Bangunan 1) Bangunan outlet 2) Bangunan terjun 3) Bangunan Penahan Banjir</p> <p>3. Gorong - gorong Pembuang 4. Talang pembuang 5. Syphon Pembuang</p> <p>Bangunan Lainnya</p> <p>1. Jalan 1) Jalan Inspeksi 2) Jalan Logistik waduk lapangan</p> <p>2. Jembatan 1) Jembatan Inspeksi 2) Jembatan hewan 3) Tangga Cuci 4) Kubangan Kerbau 5) Waduk lapangan 6) Bangunan penunjang 7) Jaringan telepon 8) Stasiun Agro</p>				
	<p>612</p> <p>612.1</p>	<p>Folder</p> <p>Tanggul Keliling</p>	<p>Biasa/ Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu</p>	<p>Bidang Teknis</p>

1	2	3	4	5	6	7
	612.2 612.3 612.4	1. Tanggul 2. Bangunan penutup sungai 3. Jembatan Bangunan Pembawa 1. Saluran 1) Saluran muka 2) Saluran pembawa waduk 3) Saluran pembawa sekunder 2. Stasiun Pompa Pemasukan 3. Bagunan bagi 4. Gorong- gorong 5. Syphon Bangunan pembuang 1. Stasiun pompa pembuang 2. Saluran 1) Saluran pembuang induk 2) Saluran pembuang sekunder 3) Pintu air pembuangan 4) Gorong-gorong pembuangan 5) Syphon pembuangan Bangunan Lainnya 1. Bangunan 1) Bangunan pengukur air 2) Bangunan pengukur curah hujan 3) Bangunan gudang stasiun pompa 4) Bangunan listrik stasiun pompa 2. Rumah petugas Aksplorasi			pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	613 613.1	Pasang Surut Bangunan pembawa 1. Saluran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	<p>613.2</p> <p>613.3</p>	<p>1) Saluran pembawa induk 2) Saluran pembawa sekunder 3) Saluran pembawa tersier 4) Saluran penyimpanan air 2. Bangunan pintu pemasukan Bangunan pembuang 1. Saluran 1) Saluran pembuang induk 2) Saluran pembuang sekunder 3) Saluran pembuang tersier 4) Saluran pengumpul air 2. Bangunan pintu pembuang Bangunan Lainnya 1. Kolam pasang 2. Saluran 1) Saluran lalu lintas 2) Saluran muka 3. Bangunan 1) Bangunan penangkis kotoran 2) Bangunan pengukur muka air 3) Bangunan pengukur curah hujan 4. Jalan 5. Jembatan</p>			<p>tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja</p>	
	<p>614</p> <p>614.1</p>	<p>Pengendalian Sungai Bangunan Pengamanan 1. Tanggul banjir 2. Pintu Pengatur banjir 3. Klep pengatur banjir</p>	<p>Biasa/ Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>
		<p>4. Tembok pengaman Talud 5. Krib 6. Kantung lumpur</p>				

1	2	3	4	5	6	7
	614.2	7. Check-Dam 8. Syphon Saluran pengaman 1. Saluran banjir 2. Saluran Drainase				
	612.3	3. Corepure Bangunan Lainnya 1. Warning System 2. Stasiun 1) Stasiun pengukur curah hujan 2) Stasiun pengukur air 3) Stasiun pengukur cuaca 4) Stasiun pos penjagaan				
	615 615.1 615.2 612.3	Pengamanan Pantai Tanggul Krib Bangunan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	616 616.1 616.2 616.3 616.4	Air Tanah Stasiun Pompa Bangunan pembawa Bangunan Pembuang Bangunan Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	620	JALAN				
	621 621.1	Jalan Kota Daerah penguasaan 1. Tanah 2. Tanaman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	621.2	3. Bangunan Bangunan sementara 1. Jalan sementara				

1	2	3	4	5	6	7
	621.3	2. Jembatan sementara 3. Kantor proyek 4. Gudang proyek 5. Barak kerja 6. Laboratorium lapangan 7. Rumah Badan jalan 1. Pekerjaan tanah (Earth Work)				
	621.4	2. Stabilitas Perkerasan 1. Lapis pondasi bawah 2. Lapis pondasi 3. Lapis permukaan				
	621.5	Drainage (Culvert) 1. Parit tanah 2. Gorong-gorong				
	621.6	Buku Trotuir 1. Tanah 2. Perkerasan 3. Pasangan				
	621.7	Median 1. Tanah 2. Tanaman 3. Perkerasan 4. Pasangan				
	621.8	Daerah samping 2. Tanaman 3. Pagar				
	621.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan 1. Rambu-rambu/ tanda lalu lintas 2. Lampu penerangan				

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lampu pengatur lalu lintas 4. Patok-patok KM 5. Patok-patok ROW (Sempadan) 6. Rel pengamanan 7. Pagar 8. Turap Penahan 9. Bronjong				
	622 622.1 622.2 622.3 622.4 622.5	Jalan Luar Kota Daerah penguasaan 1. Tanah 2. Tanaman 3. Bangunan Bangunan sementara 1. Jalan sementara 2. Jembatan sementara 3. Kantor proyek 4. Gedung proyek 5. Barak kerja 6. Laboratorium lapangan 7. Rumah Badan jalan 1. Pekerjaan tanah (Earth Work) 2. Stabilisasi Perkerasan 1. Lapis pondasi bawah 2. Lapis pondasi 3. Lapis permukaan Drainase 1. Parit	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	622.6	2. Gorong-gorong (culvert) 3. Sub Drainase Trotoar				

1	2	3	4	5	6	7
	622.7	1. Tanah 2. Perkerasan Median				
	622.8	1. Tanah 2. Tanaman 3. Perkerasan 4. Pasangan Daerah samping				
	622.9	1. Tanaman 2. Pagar Bangunan perlengkap dam pengaman 1. Rambu-rambu / Tanda lalu lintas 2. Lampu penerangan 3. Lampu pengatur lalu lintas 4. Patok-patok KM 5. Patok-patok ROW (Sempadan) 6. Rel pengamanan 7. Pagar 8. Turap Penahan 9. Bronjong				
4	630	JEMBATAN				
	631 631.1	Jembatan pada Jalan Kota Daerah penguasaan 1. Tanah 2. Tanaman 3. Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	631.2	Bangunan sementara 1. Jalan sementara 2. Jembatan sementara				
		3. Kantor proyek 4. Gudang proyek 5. Barak kerja				

1	2	3	4	5	6	7
	631.3	6. Laboratorium lapangan 7. Rumah Pekerjaan tanah (Earth Work) 1. Galian tanah 2. Timbunan tanah				
	631.4	Pondasi 1. Pondasi kepala jalan 2. Pondasi pilar 3. Angker				
	631.5	Bangunan bawah 1. Kepala jembatan 2. Pilar 3. Piloon				
	631.6	Landasan Bangunan 1. Gelagar 2. Lantai 3. Perkerasan 4. Jalan orang/Trotoar 5. Sandaran 6. Talang air				
	631.7	Bangunan/pengaman 1. Turap penahan 2. Bronjong 4. Kist dam 5. Corepure 6. Krib				
	631.8	Bangunan pelengkap 1. Rambu-rambu / Tanda-tanda lalu lintas				
		2. Lampu penerangan 3. Lampu pengatur lalu lintas 4. Patok Pengamanan				

1	2	3	4	5	6	7
	631.9	5. Patok ROW (Sempedan) 6. Pagar Oprit 1. Badan 2. Perkerasan 3. Drainase 4. Baku 5. Median				
	632 632.1 632.2 632.3 632.4 632.5	Jembatan pada Jalan Luar Kota Daerah penguasaan 1. Tanah 2. Tanaman 3. Bangunan Bangunan sementara 1. Jalan sementara 2. Jembatan sementara 3. Kantor proyek 4. Gudang proyek 5. Barak kerja 6. Laboratorium lapangan 7. Rumah Pekerjaan tanah (Earth Work) 1. Galian tanah 2. Timbunan tanah Pondasi 1. Pondasi Kepala Jembatan 2. Pondasi pilar 3. Pondasi Angker Bangunan bawah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		1. Kepala jembatan 2. Pilar 3. Pilon				

1	2	3	4	5	6	7
	632.6	4. Landasan Bangunan atas 1. Gelagar 2. Lantai 3. Perkerasan 4. Jalan orang/Trotoar 5. Sandaran 6. Talang air				
	632.7	Bangunan pengaman 1. Turap/penahan 2. Bronjong 3. Strek dam 4. Kist dam 5. Corepure 6. Krib				
	632.8	Bangunan pelengkap 1. Rambu-rambu / Tanda lalu lintas 2. Lampu penerangan 3. Lampu pengatur lalu lintas 4. Patok pengaman 5. Patok ROW (Sempedan) 6. Agar				
	632.9	Oprit 1. Badan 2. Perkerasan 3. Drainage 4. Baku 5. Median				
5	640	BANGUNAN				
	640.1	Gedung pengadilan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis
	640.2	Rumah pejabat Negara				
	640.3	Gedung DPR				

1	2	3	4	5	6	7
	640.4 640.5 640.6	Gedung Balaikota Penjara Perkantoran			tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	642 642.1 642.2 642.3	Bangunan Pendidikan Taman kanak-kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perguruan Tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	643 643.1 643.2 643.3	Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian Gedung Pemancar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	644 644.1 644.2 644.3 644.4	Bangunan Perdagangan Pusat Perbelanjaan Gedung Perdagangan Bank Perkantoran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	645 645.1 645.2 645.3 645.4 645.5 645.6 645.7	Bangunan Pelayanan Umum Kakus (MCK) Gedung Parkir Rumah Sakit Gedung Telekomunikasi Terminal Angkutan Udara Terminal Angkutan darat Bangunan Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	646 646.1 646.2	Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	646.3 646.4	Keraton Rumah Tradisional			tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	647	Bangunan Industri Seperti : Pabrik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	648 648.1 648.2 648.3 648.4	Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkotaan 1. Inti/Sederhana 2. Sedang/Mewah Rumah Pedesaan 1. Rumah Contoh Real Estate Bapetarum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	649 649.1 649.2 649.3 649.4 649.5	Elemen Bangunan Pondasi 1. Di atas tiang Dinding 1. Penahan beban 2. Tidak menahan beban Atap Lantai/Langit-langit 1. Supended 2. Solit Pintu/Jendela 1. Pintu Harmonik 2. Pintu biasa 3. Pintu sorong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		4. Pintu kayu 5. Jendela sorong 6. Jendela vertical				
6	650	TATA KOTA				

1	2	3	4	5	6	7
	651 651.1 651.2	Daerah Perdagangan /Pelabuhan Daerah pusat perbelanjaan Daerah perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	652	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	653 653.1 653.2	Daerah Perumahan Kepadatan rendah Kepadatan tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	654 654.1 654.2 654.3	Daerah Industri Industri berat Industri ringan Industri Rumah tangga, dll	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	655 655.1 655.2 655.3	Daerah Rekreasi Publik Garden Sport dan Playing Fields Open Space	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	656 656.1 656.2	Area Transportasi (Tata letak) Jaringan jalan 1. Penerangan jalan Jaringan kereta api	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	656.3	Jaringan sungai			Daerah/unit kerja	
	657	Assainering	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	657.1	Saluran pengumpulan				
	657.2	Instalasi pengolahan 1. Bangunan 1) Bangunan Penyaringan 2) Bangunan penghancur kotoran /sampah 3) Bangunan Pengendap 4) Bangunan Pegering lumpur 2. Unit Densifektan 3. Unit Perpompaan				
	658	Kesehatan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	658.1	Persampahan 1. Bangunan pengumpul 2. Bangunan pemusnahan				
	658.2	Pengotoran Udara				
	658.3	Pengotoran Air 1. Air buangan industri limbah				
	658.4	Kegaduhan				
	658.5	Kebersihan Kota				
	659	Advice Planning (Perencanaan Tata Ruang Kota)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	660	TATA LINGKUNGAN				
	660.1	Persampahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	660.2	Kebersihan Lingkungan				
	660.3	Pencemaran 1. Pencemaran Air				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pencemaran Udara			kerja	
	661	Daerah Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian / Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	665 665.1 665.2 665.3	Transportasi Jaringan jalan Jaringan kereta api Jaringan sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	670	KETENAGAAN				
	671 671.1	Listrik Kelistrikan 1. Kelistrikan PLN 2. Kelistrikan non PLN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	671.2 671.3 671.4 671.5	Pembangkit Tenaga Listrik 1. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) 2. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 3. PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) 4. PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) 5. PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) 6. PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Transmisi tenaga listrik 1. Gardu Induk/Gardu penghubung /Gardu Trafo 2. Saluran udara tegangan tinggi 3. Kabel Bawah tanah Distribusi tenaga listrik 1. Gardu distribusi 2. Tegangan rendah 3. Tegangan menengah 4. Jaringan bawah tanah Pengusahaan listrik 1. Sambungan listrik 2. Penjualan tenaga listrik 3. Tarif listrik			Daerah/unit kerja	
	672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	674	Tenaga Gas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	675	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	676	Tenaga Nuklir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	677	Tenaga Panas Bumi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	678	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	679	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	680	PERALATAN				
		Seperti : Traktor dan Peralatan Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
10	690	AIR MINUM				
	691	Intake	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	691.1	Broncaptering				
	691.2	Sumur				
	691.3	Bendungan				
	691.4	Saringan (Screen)				
	691.5	Pintu air				
	691.6	Saluran pembawa				
	691.7	Alat ukur				
	691.8	Perpompaan				
	692	Transmisi Air Baku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	692.1	Perpipaan				
	692.2	Katup Udara (Air relief)				
	692.3	Katup Penguras (blow off)				
	692.4	Bak pelepas tekanan				
	692.5	Jembatan pipa				
	692.6	Syphon				
	693	Instalasi Pengelolaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis
	693.1	Bangunan Ukur				
	693.2	Bangunan Aerasi				

1	2	3	4	5	6	7
	693.3 693.4 693.5 693.6 693.7 693.8	Bangunan Pengendapan Bangunan pembubuh bahan kimia Bangunan pengaduk Bangunan saringan Perpompaan Clear Hell			tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	694 694.1 694.2 694.3 694.4 694.5 694.6 694.7 694.8	Distribusi Reservoir Menara Bawah tanah 1. Menara 2. Reservoir di bawah tanah Perpipaan Perpompaan Jembatan Pipa Syphon Hydran 1. Hydran umum 2. Hydran kebakaran Katup 1. Katup udara (Air relief) 2. Katup pelepas (blow off) Bak Pelepas Tekanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

VIII. PENGAWASAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	PENGAWASAN				
	701	Bidang Usaha Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	703	Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi /Kearsipan Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	705	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	706	Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	707	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	708	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	709	Bidang Perjalanan Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN				
	711	Bidang Pemerintahan Pusat	-	-	-	-
	712	Bidang Pemerintahan Provinsi	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	713	Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	714	Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	715	Bidang MPR/DPR	-	-	-	-
	716	Bidang DPRD Propinsi	-	-	-	-
	717	Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	718	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	719	Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	720	BIDANG POLITIK				

1	2	3	4	5	6	7
	721	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	724	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	726	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	727	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN				
	731	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	732	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	733	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	734	Bidang Keamanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	735	Bidang Kejahatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	736	Bidang Bencana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	737	Bidang Kecelakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	741	Bidang Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	742	Bidang Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	743	Bidang Kebudayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	744	Bidang Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	745	Bidang Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	746	Bidang Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	747	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	748	Bidang Media Massa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN				
	751	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	753	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	754	Bidang Pertambangan/Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	755	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	756	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	757	Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	758	Bidang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	759	Bidang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
	761	Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	762	Bidang Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	763	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	764	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	765	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	766	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	767	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	768	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	769	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	770					
9	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	Bidang Pengadaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	782	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	783	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	785	Bidang Cuti	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	786	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	788	Bidang Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	789	Bidang Pendidikan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
10	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	792	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	793	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	794	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	795	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	797	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	799	Bidang Bendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

IX. KEPEGAWAIAN

No.	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	800	KEPEGAWAIAN				
		Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	800.1	Perencanaan				
	800.2	Penelitian				
	800.04	3. Pengaduan				
	800.05	Tim				
	800.07	Statistik				
	800.08	Peraturan perundang- undangan				
2	810	PENGADAAN				
		Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai				
	811	Lamaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	811.1	Testing				
	811.2	Screening				
	811.3	Panggilan				
	812	Pengujian Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	813 813.1 813.2 813.3 813.4 813.5	Pengangkatan Calon Pegawai Pengangkatan calon pegawai Gol. I Pengangkatan calon pegawai Gol. II Pengangkatan calon pegawai Gol. III Pengangkatan calon pegawai Gol. IV Pengangkatan calon guru INPRES	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	814 814.1 814.2 814.3	Pengangkatan Tenaga Lepas Pengangkatan tenaga bulanan/ Tenaga Kontrak Pengangkatan tenaga harian Pengangkatan tenaga pensiunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	820	MUTASI				
		Meliputi : Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan Pelimpahan data sering, Tugas belajar, Wajib militer				
	821 821.1 821.2	Pengangkatan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Tetap 1. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan I 2. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan II 3. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan III 4. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan IV 5. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang cuti di luar tanggungan negara 6. Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan Berita Acara serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		1. Sekretaris Daerah / Staf Ahli/Asisten Sekda/Inspektur/Sekwan/Kepala Dinas/ Kepala Badan / Kepala Kantor 2. Kepala Bagian/Sekretaris/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang 3. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi 4. Bidang/ Pemeriksa 5. Residen 6. Wadana 7. Camat 8. Lurah Administratif (Lurah Desa) 9. Jabatan lainnya				
	822 822.1 822.2 822.3 822.4	Kenaikan gaji berkala Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	823 823.1 823.2 823.3 823.4	Kenaikan pangkat/ pengangkatan Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	824 824.1 824.2 824.3 824.4 824.5 824.6 824.7	Pemindahan, Pelimpahan, Perbantuan Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV Lolos butuh Kurikulum dan Silabi Proposal (TOR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	825	Data sering dan penempatan kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	826 826.1 826.2 826.3 826.4	Penunjukkan tugas belajar Dalam negeri Luar negeri Tunjangan belajar Penempatan kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	827	Wajib militer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	828	Mutasi dengan instansi lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	830	KEDUDUKAN				
		Meliputi: Penghitungan masa kerja, Penyesuaian pangkat/gaji, Penghargaan ijazah dan jenjang pangkat				
	831	Penghitungan masa kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	832	Penyesuaian pangkat/gaji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	823.1 823.2 823.3 823.4	Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV			dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	833	Penghargaan ijazah / Penyesuaian Ijazah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	834	Jenjang pangkat / Eselonering	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	835	Pemakaian Gelar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
		Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/tanah, Bantuan sosial, Rekreasi dan Dispensasi				
	841 841.1 841.2 841.3 841.4	Tunjangan Jabatan Kehormatan Kematian / Uang duka Tunjangan hari raya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	841.5	Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah				

1	2	3	4	5	6	7
	841.6 841.7	Keluarga Pangan, Sandang , papan (Bapetarum)				
	842 842.1 842.2 842.3	Dana Taspen Kesehatan Asuransi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	843 843.1 843.2 843.3 843.4	Perawatan Kesehatan Poliklinik Perawatan dokter Obat-obatan Keluarga Berencana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	844 844.1 844.2 844.3	Koperasi/Distribusi Distribusi Pangan Distribusi Sandang Distribusi Papan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	845 845.1 845.2 845.3	Perumahan /Tanah Perumahan pegawai Tanah kapling Losmen/hotel	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	846 846.1 846.2	Bantuan sosial Bantuan Kebakaran Bantuan banjir	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	847	Rekreasi/Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	848	Dispensasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	850	CUTI				
		Meliputi: Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti di luar Tanggungan negara, Cuti Alasan penting/alasan lainnya				
	851	Cuti tahunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	852	Cuti besar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	853	Cuti sakit	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	854	Cuti Bersalin/hamil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	855	Cuti naik haji/ Umroh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	856	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	857	Cuti Alasan Penting/ Cuti alasan lain	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	860	PENILAIAN				
		Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian dinas, Penilaian kekayaan pribadi, dan Rehabilitasi				
	861	Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	861.1	Bintang/Satyalencana				
	861.2	Kenaikan pangkat anumerta				
	861.3	Kenaikan gaji istimewa				
	861.4	Hadiah berupa uang				
	861.5	Pegawai Teladan				
	862	Hukuman	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	862.1 862.2 862.3 862.4	Teguran Peringatan Penundaan kenaikan gaji Penurunan pangkat Pemindahan Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan terhormat lihat 887 dan 888			mengganggu rahasia daerah Kabupaten Karo	
	863	Kondite, DP3, Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	864 864.1 864.2 864.3	Ujian dinas Tingkat I Tingkat II Tingkat III	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	865	Penilaian kehidupan pegawai Negeri. Meliputi : Tata hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	866	Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				

1	2	3	4	5	6	7
		Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar riwayat hidup, Hak, Pengajian, Sumpah/janji, dan Korps pegawai				
	871	Formasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	872	Bezetting/ DUK	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	873 873.1 873.2 873.3 873.4	Registrasi NIP KARPEG Legitimasi/Tanda pengenalan Daftar keluarga /Kp4, Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat	Bidang Teknis
	874 874.1 874.2 874.3	Daftar Riwayat Pekerjaan Tanggal lahir Penggantian Nama Izin Keperwakilan organisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	875 875.1 875.2	Kewenangan Mutasi Pegawai Pelimpahan wewenang Specimen tanda tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	876	Penggajian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	876.1	SKPP, SKKPS			yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	877	Sumpah/Janji pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	878	Koprs Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI				
		Meliputi: Atas Pemberhentian, Permintaan sendiri, Dengan hak pensiun, Karena meninggal dunia, Alasan lain, Dengan diberi uang pesangon, Uang tunggu untuk sementara waktu, dan pemberhentian tidak dengan hormat				
	881	Permintaan sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	882	Dengan Hak Pensiun	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	882.1 882.2 882.3 882.4 882.5 882.6 882.7	Pegawai Negeri Gol. I Pegawai Negeri Gol. II Pegawai Negeri Gol. III Pegawai Negeri Gol. VI Pensiun Janda/duda Pensiun Yatim Piatu Uang muka Pensiun			yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	883 883.1	Karena meninggal dunia Meninggal dalam tugas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	884	Alasan lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	885	Uang pesangon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	886	Uang Tunggu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	887	Untuk sementara waktu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kabupaten Karo	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	888	Tidak dengan hormat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kabupaten Karo	Bidang Teknis
10	890	PENDIDIKAN PEGAWAI				
		Meliputi: Perencanaan, Pendidikan reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Luar negeri, Metode, Tenaga pengajar, Administrasi pendidikan, Fasilitas sarana pendidikan				
	891 891.1 891.2 891.3	Perencanaan Program Kurikulum dan Silabi Proposal (TOR)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	892 892.1 892.2	Pendidikan reguler / Kader IPDN/APDN Kursus-Kursus Reguler	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	893 893.1 893.2 893.3 893.4 893.5	Pendidikan dan Pelatihan /Non Reguler LEMHANAS Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM Kursus-Kursus /Penataran Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan Diklat Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	894 894.1	Pendidikan Luar negeri Berkesinambungan/berkala /bergelar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	894.2	Non Gelar/ Diploma			pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	895 895.1 895.2 895.3 895.4 895.5 895.6 895.7	Metode Kuliah Ceramah,simposium Diskusi, raker, seminar, lokakarya, orientasi Studi lapangan,KKN, Widyawisata Tanya Jawab, Silabi, Modul, Kursil Penugasan Gladi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	896 896.1	Tenaga pengajar/Widyaiswara/Nara sumber Moderator	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	897 897.1 897.2 897.3 897.4 897.5	Administrasi pendidikan Tahun pelajaran Persyaratan,meliputi pendaftaran, testing, ujian STTP Penilaian Angka Kredit Laporan pendidikan dan Pelatihan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	898 898.1 898.2 898.3 898.4 898.5	Fasilitas Belajar Tunjangan belajar Asrama Uang makan Uang Transport Uang buku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	898.6 898.7	Uang Ujian Uang Semester/ Uang kuliah				

1	2	3	4	5	6	7
	898.8	Uang saku				
	899	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	899.1	Bantuan sarana belajar				
	899.2	Bantuan alat-alat tulis				
	899.3	Bantuan sarana belajar lainnya				

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO

X. KEUANGAN

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	900	KEUANGAN				
	901	Nota Keuangan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kabupaten Karo	Bidang Teknis
	902	APBN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	903	APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	904	APBN-P	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	905	Dana Alokasi Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	906	Dana Alokasi Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	907	Dekonsentrasi (Pelimpahan dana dari pusat ke daerah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	910	ANGGARAN				
	911	Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	912	Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	913	Anggaran Belanja Tambahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	914 914.1	Daftar Isian Kegiatan (DIK) Daftar Usulan Kegiatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	915 915.1 915.2	Daftar Isian Proyek (DIP) Daftar Usulan Proyek (DUP) Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	916	Revisi Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	920	OTORISASI/SKO				
	921	Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	922	Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	924	Ralat SKO	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	930	VERIFIKASI				
	931	S.P.M Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	932	S.P.M Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	933	Penerimaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	934	SPJ Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	935	SPJ Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	936	Nota Pemeriksaan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kabupaten Karo	Bidang Teknis
	937	SP Pemindehan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	943	Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	953	Penghapusan Kekayaan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan Pengangkatan /Pemberhentian Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	955	Spesimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	970	PENDAPATAN				
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	972	Subsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	974	Retribusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	975	Bea	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	976	Cukai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	977	Pungutan /PNBP	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	978	Bantuan Presiden, Menteri, dan Bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	980					
10,	990	BENDAHARAWAN				
	991	SKPP/SKPPS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA